

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan PKPA di Apotek Onehealth sejak tanggal 16 April – 18 Mei 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA di Apotek dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, tugas, dan peran apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek, khususnya dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis di apotek.
2. Kegiatan PKPA di Apotek memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Kegiatan PKPA di Apotek dapat membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan dan penyimpanan peracikan, serta pengendalian tanggal kedaluwarsa.
4. Kegiatan PKPA di Apotek telah memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

1. Memahami peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Apotek (Undang-Undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan).
2. Mempelajari obat-obat yang dapat digunakan untuk kasus swamedikasi umum.
3. Menghafal obat-obat generik, indikasi, aturan pakai dan cara penyimpanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor FY.01.01/1/785/2021 Tahun 2021 tentang Implementasi Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Jakarta: Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia.
- Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor FY.07.03/E.IV/781/2023 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Republik Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^a . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.001/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^b . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.002/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^c . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.004/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia. 82
- Ikatan Apoteker Indonesia^d . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan. Surat Edaran Nomor KT.05.02/1/9754/2021 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker Elektronik (ESTRA). Jakarta:
- Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan. 84 Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, *Drug Information Handbook* , 26th Ed., American Pharmacists Association, North America.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda. 138 Medscape, 2022
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . 2021, *Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
- Sweetman, S. C., 2014. Martindale: The Complete Drug Reference. 37th ed. London: Pharmaceutical Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.